



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

NOMOR:07/HK.03.1/9119/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, Menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2020 – 2024.

KEEMPAT : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap

pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan<sup>-4-</sup> kepada KPU Republik Indonesia.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorendiweri  
pada tanggal 29 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,**

**SELVIA MUNDONI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

**M. YUSUF ASRI**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NOMOR: 07/HK.03.1/91119/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI**

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kerja Utama (4)	Keterangan (5)
1.	<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	Mengacu kepada kajian hukum berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Public	Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL 1. AD/ART termutakhir 2. Susunan Pengurus Termutakhir
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi sesuai target yang ditetapkan 1. Pengungkit a. Aspek Pemenuhan - Manajemen Perubahan - Deregulasi Kebijakan - Penataan Organisasi - Penataan Tatalaksana - Penataan Manajemen SDM

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Penguatan Akuntabilitas</li><li>- Penguatan Pengawasan</li><li>- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li></ul> <p>b. Aspek Hasil Antara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kualitas Pengelolaan Arsip</li><li>- Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang</li><li>- Kualitas Pengelolaan Keuangan</li><li>- Kualitas Pengelolaan Aset</li><li>- Merit Sistem</li><li>- ASN Profesional</li><li>- Kualitas Perencanaan</li><li>- Maturitas SPIP</li><li>- Kapabilitas APIP</li><li>- Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan</li></ul> <p>c. Aspek Reform</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Manajemen Perubahan</li><li>- Deregulasi Kebijakan</li><li>- Penataan Organisasi</li><li>- Penataan Tatalaksana</li><li>- Penataan Manajemen SDM</li><li>- Penguatan Akuntabilitas</li><li>- Penguatan Pengawasan</li><li>- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li></ul>
			<p>2. Hasil</p> <p>a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opini BPK</li></ul> <p>b. Kualitas Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indeks Persepsi Kualitas</li><li>- Pelayanan</li></ul> <p>c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Persepsi Anti Korupsi</li> <li>d. Kinerja Organisasi             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Kinerja</li> <li>- Kinerja lainnya</li> <li>- Survie Internal Organisasi</li> </ul> </li> </ul>
			<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja</li> <li>4. Evaluasi Internal</li> <li>5. Capaian Kinerja</li> </ol>
			<p>Opini BPK atas Laporan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan</li> <li>2. Pencatatan asset dan persediaan yang tertib</li> <li>3. Kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan BMN</li> </ol>
			<p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah permohonan yang dapat dilayani</li> <li>2. Pembaharuan dan publikasi informasi e-PPID secara berkala</li> </ol>
<p>2. <b>Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b></p>		<p>Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan</p>	<p>Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan jumlah pemilih pada daftar pemilih</p> <p>Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih perempuan yang terdaftar</p> <p>Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan seluruh pemilih disabilitas didalam DPT</p>

		<p>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>	<p>Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p> <p>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang Berlaku</p> <p>Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai</p> <p>Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU</p>	<p>Daftar Pemilih Tetap tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap</p> <p>Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan</p> <p>Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai tanpa konflik</p> <p>Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang menang</p>
<p>3.</p>	<p><b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b></p>	<p>Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</p>	<p>Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai</p>	<p>Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai tanpa konflik</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Persepsi Anti Korupsi</li> <li>- Kinerja Organisasi</li> <li>- Capaian Kinerja</li> <li>- Kinerja lainnya</li> <li>- Survie Internal Organisasi</li> </ul>
			<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja</li> <li>4. Evaluasi Internal</li> <li>5. Capaian Kinerja</li> </ol>
			<p>Opini BPK atas Laporan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara</li> <li>2. Pengeluaran sesuai dengan ketentuan</li> <li>3. Pencatatan asset dan persediaan yang tertib</li> <li>4. Kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan BMN</li> </ol>
			<p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah permohonan yang dapat dilayani</li> <li>2. Pembaharuan dan publikasi informasi e-PPID secara berkala</li> </ol>
<p>2. <b>Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b></p>		<p>Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan</p>	<p>Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan jumlah pemilih pada daftar pemilih</p> <p>Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih perempuan yang terdaftar</p> <p>Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan seluruh pemilih disabilitas didalam DPT</p>

		<p>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>	<p>Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p> <p>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang Berlaku</p> <p>Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai</p> <p>Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU</p>	<p>Daftar Pemilih Tetap tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan Daftar Pemilihan Tetap</p> <p>Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan</p> <p>Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai tanpa konflik</p> <p>Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang menang</p>
<p>3.</p>	<p><b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b></p>	<p>Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</p>		

Ditetapkan di Sorendiweri

pada tanggal 29 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

SELVIA MUNDONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



M. YUSUF ASRI



Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
36,30				24,93	68,68%
14,60				9,94	68
2,00				1,68	84
0,40				0,31	0,78
	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	A	1,00	
	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	B	0,67	
0,40				0,40	1,00
	Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1,00	
	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1,00	
	a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab	A/B/C	A	1,00	
0,80				0,57	0,71
	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor sebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	B	0,50	
	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	A	1,00	
	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	B	0,67	
0,40				0,40	1,00
	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1,00	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Evidence/Bukti/Dokumen
KPU Kabupaten Supiori telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi	
Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Supiori sesuai dengan rencana kerja	
Sebagian besar rencana kerja KPU Kabupaten Supiori telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	
Rencana Kerja Reformasi KPU Kabupaten Supiori telah disusun dan diformalkan	
Seluruh anggota organisasi KPU Kabupaten Supiori telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	
Rencana Kerja KPU Kabupaten Supiori telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map	
Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua KPU Kabupaten Supiori sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB	
Tidak seluruh koordinator assessor KPU Kabupaten Supiori mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas	
Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan di KPU Kabupaten Supiori	
Sebagian besar rencana kerja KPU Kabupaten Supiori telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	
Pimpinan KPU Kabupaten Supiori terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi Foto dan link berita pelaksanaan RB	

Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
	a. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i>	A/B/C/D	A	1,00	
1,00				0,50	0,50
1,00				0,50	0,50
	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	B	0,50	
	a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakannya yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	B	0,50	
2,00				1,67	0,84
1,00				1,00	1,00
	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	A/B/C	A	1,00	
	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	A/B/C	A	1,00	
	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	A/B/C	A	1,00	
	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	A/B/C	A	1,00	
	a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja	A/B/C	A	1,00	
	a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya	A/B/C	A	1,00	
	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	A/B/C	A	1,00	
	a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	A/B/C	A	1,00	
	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi	A/B/C	A	1,00	
	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	A/B/C	A	1,00	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Evidence/Bukti/Dokumen
<p>Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap KPU Kabupaten Supiori</p>	
<p>Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat pada KPU Kabupaten Supiori</p>	
<p>Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat pada KPU Kabupaten Supiori telah selesai dilakukan, namun belum selesai</p>	
<p>KPU telah melakukan evaluasi Kelembagaan di tahun 2018, dan akan kembali melakukan di tahun 2021</p>	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
<p>KPU telah melakukan evaluasi Kelembagaan di tahun 2018, dan akan kembali melakukan di tahun 2021</p>	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
<p>KPU sedang melakukan penyusunan bisnis proses dan memetakan kemungkinan terjadinya duplikasi fungsi</p>	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
<p>KPU telah melakukan evaluasi Kelembagaan di tahun 2018, dan akan kembali melakukan di tahun 2021</p>	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
<p>KPU telah melakukan evaluasi Kelembagaan di tahun 2018, dan akan kembali melakukan di tahun 2021</p>	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
<p>KPU sedang menyusun Tipeologi KPU Provinsi. Evaluasi Kelembagaan sudah dilakukan dan KPU akan kembali melakukan evaluasi di tahun 2021</p>	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
<p>KPU telah melakukan evaluasi Kelembagaan di tahun 2018, dan akan kembali melakukan di tahun 2021</p>	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
<p>KPU telah melakukan evaluasi Kelembagaan di tahun 2018, dan akan kembali melakukan di tahun 2021</p>	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
<p>KPU sedang melakukan penyusunan bisnis proses dan memetakan kemungkinan terjadinya duplikasi fungsi dan akan melaksanakan evaluasi kelembagaan di tahun 2021</p>	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
<p>KPU telah melakukan evaluasi Kelembagaan di tahun 2018, dan akan kembali melakukan di tahun 2021</p>	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>

Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
1,00				0,67	0,67
	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	B	0,67	
1,00				0,66	0,66
0,50				0,29	0,58
	a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	A/B/C	B	0,50	
	a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	B	0,50	
	a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	A/B/C	B	0,50	
	a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	A/B/C	B	0,50	
	a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	A/B/C	B	0,50	
0,50				0,38	0,75
	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	1,00	
	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	B	0,50	
1,40				0,95	0,68
0,20				0,09	0,44

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Evidence/Bukti/Dokumen
Sebagian besar hasil evaluasi pada KPU Kabupaten Supiori telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	
Sebagian besar hasil evaluasi KPU Kabupaten Supiori telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi	
KPU sedang melakukan penyusunan bisnis proses dan memetakan kemungkinan terjadinya duplikasi fungsi sesuai SOTK baru (PKPU 14 Tahun 2020)	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
Sebagian peta proses bisnis KPU Kabupaten Supiori telah sesuai dengan tugas dan fungsi	
Sebagian peta proses bisnis KPU Kabupaten Supiori telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	
Sebagian besar jenjang organisasi KPU Kabupaten Supiori telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja	
Sebagian besar peta proses bisnis KPU Kabupaten Supiori telah dijabarkan dalam SOP	
KPU Kabupaten Supiori telah melakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	
Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan pada KPU Kabupaten Supiori	
Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP KPU Kabupaten Supiori secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti	
KPU telah melakukan evaluasi Kelembagaan di tahun 2018, dan akan kembali melakukan di tahun 2021	<a href="http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU">http://bit.ly/EvaluasiKelembagaanSetienKPU</a>
Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik dibuktikan dengan SK PPIB DAN SOP PPIB	
KPU Kabupaten Supiori melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala	

Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	B	0,50	
	a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C	B	0,50	
	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C/D	C	0,33	
0,20				0,13	0,67
	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	B	0,67	
0,40				0,28	0,70
	a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu	A/B/C/D	A	1,00	
	a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1,00	
	a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	A	1,00	
	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	D	0,25	
	a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu	A/B/C/D/E	D	0,25	
	a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya	A/B/C/D	B	0,67	
0,20				0,17	0,84
	a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan	A/B/C/D	B	0,67	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Evidence/Bukti/Dokumen
KPU Kabupaten Supiori telah menyusun ANIAB-ABK dan melakukan pengusulan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum dll.	
KPU Kabupaten Supiori telah menyusun Sebagian ANIAB-ABK	
Arjab dan ABK di lingkungan KPU Kabupaten Supiori sudah sesuai dengan tingkat keberhasilan organisasi, khususnya dalam mencapai target rencana strategis Pemilu-Pemilihan, namun perlu kembali disesuaikan dengan SOTK Baru PKPU 14 Tahun 2020	
KPU Kabupaten Supiori telah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai	
KPU Kabupaten Supiori Telah melakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	
Penerapan penetapan kinerja individu pada KPU Kabupaten Supiori telah dilakukan terhadap seluruh pegawai	
Sekuruh penilaian kinerja individu pada KPU Kabupaten Supiori terkait dengan kinerja organisasi	
Seluruh ukuran kinerja individu pada KPU Kabupaten Supiori sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	
Pengukuran kinerja individu pada KPU Kabupaten Supiori dilakukan secara tahunan	
KPU Kabupaten Supiori telah melakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan	
Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya	
Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan pada KPU Kabupaten Supiori	

Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
	a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	A/B/C	A	1,00	
0,20				0,08	0,42
	a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKI pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKI pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKI pada sebagian jabatan d. SKI belum diimplementasi	A/B/C/D	C	0,33	
	a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKI dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKI namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKI d. Evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKI e. Evaluasi jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	C	0,50	
0,20				0,20	1,00
	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya/Tidak	Ya	1,00	
2,50				1,73	0,69
1,00				0,84	0,84
	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	A	1,00	
	a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	A	1,00	
	a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada	A/B/C/D	A	1,00	
	a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja	A/B/C/D	B	0,67	
1,50				0,88	0,59
	a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	C	0,50	
2,20				1,58	0,72
0,30				0,26	0,88

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Evidence/Bukti/Dokumen
KPU telah melakukan monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala	
KPU Kabupaten Supiori hanya mengimplementasikan SKI pada jabatan Sekretaris	
Evaluasi Jabatan pada KPU Kabupaten Supiori dilaksanakan pada jabatan sekretaris berdasarkan SKI	
Penggunaan Aplikasi My SAPK	
Pimpinan KPU Kabupaten Supiori terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra	
Pimpinan KPU Kabupaten Supiori terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja	
Pimpinan KPU Kabupaten Supiori memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala	
Pimpinan KPU Kabupaten Supiori terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah	
Pimpinan KPU Kabupaten Supiori memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun	
Pimpinan KPU Kabupaten Supiori memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala	
Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja pada KPU Kabupaten Supiori	
Pemutakhiran data kinerja KPU Kabupaten Supiori dilakukan secara Semesteran	

Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
	a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan <i>public campaign</i>	A/B/C	B	0,50	
	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1,00	
	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1,00	
	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Ya	1,00	
0,30				0,21	0,70
	a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian	A/B/C	B	0,50	
	a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian d. Risiko belum dikendalikan	A/B/C/D	B	0,67	
	a. SPI telah diformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A/B/C	A	1,00	
	a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI	A/B/C/D	B	0,67	
0,50				0,36	0,72
	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	0,50	
	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Ya	1,00	
0,30				0,20	0,67
	a. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke seluruh pegawai b. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. <i>Whistle blowing system</i> belum disosialisasikan	A/B/C/D	B	0,67	
0,30				0,21	0,71
	a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan	A/B/C/D	B	0,67	
	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	1,00	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Evidence/Bukti/Dokumen
Public campaign pada KPU Kabupaten Supiori telah dilakukan tidak secara berkala	
Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan pada KPU Kabupaten Supiori KPU Kabupaten Supiori telah melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Supiori	
KPU Kabupaten Supiori telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian	
KPU Kabupaten Supiori telah menilai sebagian besar risiko	
Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi pada KPU Kabupaten Supiori telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian	
SPI pada KPU Kabupaten Supiori telah diformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait	
Sistem pengendalian intern pada KPU Kabupaten Supiori dimonitoring dan evaluasi secara berkala	
Monitoring dan evaluasi pada KPU Kabupaten Supiori telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI	
KPU Kabupaten Supiori telah membuka akses pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk.	
KPU Kabupaten Supiori telah membuka akses pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Dilakukan monitoring dan evaluasi tidak secara berkala.	
KPU Kabupaten Supiori telah membuka akses pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	
Whistle blowing system pada KPU Kabupaten Supiori telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai	
Penanganan Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Supiori telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai	
Penanganan Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Supiori telah diimplementasikan	

Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	0,50	
	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C/D	B	0,67	
0,50				0,33	0,67
	Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Ya/Tidak	Ya	1,00	
	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A/B/C	B	0,50	
	a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi	A/B/C	B	0,50	
2,50				1,18	0,47
0,40				0,28	0,70
	a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	B	0,75	
	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	B	0,67	
	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	B	0,67	
0,40				0,13	0,33
	a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D	C	0,33	
	a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website /media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	B	0,67	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Evidence/Bukti/Dokumen
Penanganan Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Supiori dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	
Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Supiori telah ditindaklanjuti	
Belum dilakukan penguatan Pembangunan zona integritas level unit kerja, namun sebagian ASN telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas	
Pembangunan zona integritas pada KPU Kabupaten Supiori dilakukan tidak secara intensif	
Pembangunan zona integritas pada KPU Kabupaten Supiori telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala	
KPU Kabupaten Supiori telah menetapkan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku	
Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website/media sosial KPU Kabupaten Supiori	
KPU Kabupaten Supiori telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders	
Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan pada KPU Kabupaten Supiori	
Seluruh Informasi tentang pelayanan KPU Kabupaten Supiori dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	

